

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI BENTUK PERAMPASAN KEMERDEKAAN

**Oleh
SELLA SABILLA**

Tindakan pemasungan merupakan segala bentuk pembatasan gerak yang dilakukan dengan cara pengekangan fisik menggunakan blok kayu atau rantai pada salah satu bagian tubuhnya ataupun mengurung dalam sebuah ruangan tertutup dalam rangka merampas kemerdekaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga ODGJ tidak dapat bergerak secara bebas sebagaimana mestinya serta kehilangan haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Permasalahan yang menjadi topik utama dalam skripsi ini adalah apakah tindakan pemasungan terhadap ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan Psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan melalui literatur-literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasungan ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur teori hukum pidana yaitu perbuatan orang yang bertentangan dengan hukum pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindakan pemasungan termasuk dalam pelanggaran HAM sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, selain itu tindakan pemasungan juga sudah dilarang dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan bahwa pelaku pemasungan memenuhi alasan penghapus pidana apabila dilakukan dalam keadaan darurat. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana adalah dengan memberikan sanksi pidana namun pemidanaan terhadap pelaku pemasungan hanya menciptakan kepastian hukum namun mengecualikan aspek kemanfaatan dan keadilan hukum, mengingat pelaku melakukannya atas dasar terpaksa karena keterbatasan ekonomi. KUHP Nasional juga melarang tindakan pemasungan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

Sella Sabilla

Saran yang dapat penulis berikan adalah diharapkan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan fasilitas kesehatan jiwa yang lebih merata dan terstruktur agar dapat dijangkau semua kalangan sehingga tidak lagi terjadi tindakan diskriminasi terhadap ODGJ berupa pemasungan serta masyarakat hendaknya lebih peduli tentang kesehatan mental dan tidak lagi berstigma negatif terhadap ODGJ.

Kata Kunci : Pemasungan, ODGJ, Hukum Pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL LAW PERSPECTIVE ON THE ACT OF CONFINEMENT PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS (PWMI) AS A FORM OF DEPRIVATION OF FREEDOM

**By
SELLA SABILLA**

The act of confinement is any form of restriction of movement carried out by means of physical restraint using wooden blocks or chains on one part of the body and also confining in a closed room in order to deprive the freedom of People with Mental Illness (PWMI). So that PWMI can not move and do activities freely as they should and lose their right to receive health care. The problem that is the main topic in this thesis is whether the act of confining PWMI is an act against criminal law and what is the perspective of criminal law on the act of confining PWMI as a form of deprivation of freedom.

This research is a qualitative research that uses normative legal and empirical legal approaches. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data source comes from interviews with Psychiatrists at the Lampung Provincial Mental Hospital and Lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung, secondary data sources come from literature studies through legal literature.

The results of the research show that the act of confinement PWMI is an act against criminal law because it fulfills the elements of criminal law theory, namely the act of a person that is contrary to criminal law, carried out with mistake, and by a person who is capable of being responsible. The act of confinement is included in human rights violations as a form of deprivation of liberty as regulated in Article 333 of the Criminal Code, in addition, the act of confinement is also prohibited in Article 76 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The criminal law perspective on the act of confinement is that the perpetrator of restraining fulfills the reason for eliminating the criminal penalty if it is carried out in an emergency. The responsibility of the perpetrator of the crime is by giving criminal sanctions, but the punishment of the perpetrator of restraining only creates legal certainty but excludes aspects of legal benefit and justice, considering that the perpetrator does it under duress due to economic limitations. The National Criminal Code also prohibits the act of confinement PWMI as a form of deprivation of freedom.

Sella Sabilla

The suggestion that the author can give is that the central and regional governments are expected to improve mental health facilities that are more evenly distributed and structured so that they can be accessed by all groups so that there are no more acts of discrimination against psychoneurotic in the form of confinement and the community should care more about mental health and no longer have a negative stigma towards PWMI.

Keywords : Confinement, PWMI, Criminal Law.